

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada penelitian ini, yang menjadi pembahasan utama adalah bagaimana kolonialisme Inggris di Myanmar pada 1824-1948 menjadi salah satu faktor utama di balik gelombang konflik yang terjadi dalam krisis Rohingya 2012-2017. Dengan menggunakan teori *protracted social conflict*, dibuktikan bahwa masuknya kolonialisme Inggris di Myanmar menjadi awal perubahan kondisi non-konflikual menjadi konflikual sebagaimana dijelaskan oleh fase genesis dalam teori *protracted social conflict*. Kedatangan Inggris dengan kebijakan *divide and rule policy* dan pembentukan sistem pemerintahan *dyarchy* di bawah kekuasaannya memunculkan sentimen xenofobia dari masyarakat Buddhis Burma terhadap Rohingya. Dalam kondisi ini, dapat dikatakan jika konflik sosial yang terjadi memang diakibatkan oleh beragam faktor, seperti kebencian di masa lalu, politik identitas, adanya elit yang manipulatif, hingga perebutan kekuasaan.

Lebih lanjut, teori *protracted social conflict* menjelaskan bahwa timbulnya reaksi agresif dari kelompok *Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA)* akibat kebijakan pemerintah Myanmar dan diskriminasi dari masyarakat Buddhis Burma merupakan gambaran dari fase dinamika proses. Segala yang terjadi dalam gelombang baru dalam krisis Rohingya 2012-2017, utamanya yang dilakukan oleh pemerintah Myanmar terhadap Rohingya, juga dapat dikategorikan sebagai

praktik apartheid. Timbulnya banyak dampak negatif dari kekejaman ini menjadi gambaran dari bagian analisis hasil dalam teori *protracted social conflict*.

Untuk itu, dapat disimpulkan jika terjadinya gelombang kekerasan baru dalam krisis Rohingya 2012-2017 sesuai dengan gambaran konflik sosial berkepanjangan dalam teori *protracted social conflict*.

4.2 Saran

Berdasarkan penjabaran di atas, penulis memiliki beberapa saran yang ditujukan kepada pihak-pihak terkait dalam krisis yang terjadi. Saran yang dapat diberikan penulis kepada siapapun yang memiliki kekuasaan untuk membuat kebijakan, baik yang hanya akan berdampak untuk internal negaranya sendiri ataupun pihak lain, adalah baiknya mempertimbangkan matang-matang sebelum mengesahkan dan menjalankan kebijakan yang hendak dibuat. Apa yang terjadi dalam krisis Rohingya menjadi bukti jika apa yang terjadi di masa lalu, dapat berdampak secara signifikan terhadap apa yang terjadi di masa kini. Pembuatan kebijakan secara bijak tentu menjadi keharusan, agar apa yang terjadi di masa kini, tidak terkena dampak buruknya yang berkepanjangan hingga berdampak negatif di masa depan, seperti kondisi yang dialami masyarakat Rohingya. Di samping itu, negara semestinya menjadi pihak yang melindungi masyarakatnya dan paling tidak, mampu memenuhi kebutuhan dasar mereka. Di samping itu, sebagai institusi yang menaungi negara-negara Asia Tenggara, mestinya ASEAN memiliki kapasitas lebih untuk menunjukkan langkah konkret yang mampu menuntaskan krisis yang terjadi.

Masyarakat juga ada baiknya terus mengedukasi diri sendiri terkait apa yang sebenarnya terjadi sehingga memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hal tersebut. Mengingat isu ini adalah isu yang sensitif, maka ada baiknya betul-betul menyaring sumber informasi yang dijadikan acuan pemahaman.

Kemudian untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya berusaha untuk mencari sumber yang terpercaya dan terkini. Dikarenakan permasalahan ini sudah berlangsung lama, tidak akan begitu sulit untuk menemukan sumber-sumber sekunder yang mencakup informasi yang dibutuhkan. Namun, jika memang memungkinkan untuk mencari data primer, maka ada baiknya menggunakan data primer untuk memperkuat argumen yang dibawa.